

MODEL TUDANG SIPULUNG DALAM PEMBELAJARAN ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL

Yunus

Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Eresha, Jakarta, Indonesia

Article History:

Received: October, 2020

Accepted: November 2020

Published: December 2020

Keywords:

Model, Tudassipung, Islam and Local Wisdom

*Correspondence Address:

nurhang542@gmail.com

Abstract :

The research aims to explore the concept of local wisdom education with the tudassipung (sitting together) model. This study uses a qualitative method with an ethnopedagogical approach. The technique of collecting data through interviews, interviewed informants came from several groups, from academics (lecturers) as many as 6 people, students from several ethnic groups, 4 from Toraja, 4 from Rongkong, 9 from Bugis and 8 from students. Researchers also interviewed 6 community leaders. The result of the research is that learning Islam and local wisdom using the tudassipung model is quite effective. This can be seen from the assessment of 5 (five) aspects, namely attitudes, interests, self-concept, values, and morals with 5 levels, namely: receiving, responding, valuing, organization, characterization

Abstrak :

Penelitian bertujuan untuk menggali konsep pendidikan kearifan lokal dengan model tudassipung (duduk bersama). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnopedagogi. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, informan yang diwawancarai berasal dari beberapa kalangan, dari akademis (Dosen) sebanyak 6 orang, kalangan mahasiswa bersumber dari beberapa suku, Toraja sebanyak 4, Rongkong 4 orang, Bugis 9 orang dan mahasiswa 8 orang. Peneliti juga, mewawancarai kalangan tokoh masyarakat sebanyak 6 orang. Hasil penelitian bahwa pembelajaran Islam dan Kearifan Lokal dengan menggunakan model tudassipung cukup efektif. Hal dilihat dari penilaian 5 (lima) aspek yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral dengan 5 tingkatan, yaitu: receiving, responding, valuing, organization, characterization

PENDAHULUAN

Konflik bernuansa suku, agama ras dan antar golongan (SARA), sesungguhnya merupakan salah satu tipe konflik yang tak mudah untuk diuraikan terlebih lagi konflik agama (Baharun & Awwaliyah, 2017), namun bukan berarti konflik tersebut tidak bisa dikelola dengan baik. George Weige, memberi penilaian agama secara seimbang, menurutnya, agama dapat menjadi sumber konflik, di saat yang sama juga memiliki potensi kreatif yang dapat berfungsi sebagai jaminan yang kuat untuk menciptakan toleransi, pluralisme, demokratis, dan menjadi sebuah resolusi konflik nir-kekerasan (George Weige, 1992). Hal ini dapat terwujud, apabila adanya kesediaan dari pemeluk agama untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya secara mendalam, dewasa, toleran, dan pluralis (R.S. Appleby, 2000).

Perlibatan nilai-nilai kearifan lokal sangat diperlukan sebagai sarana pendukung dalam usaha menciptakan solidaritas sosial, mengawetkan, serta mengalih-generasikan budaya sehingga dapat meminimalisasi konflik sosial Wasisto (Raharjo Jati, 2013). Dengan demikian, lingkungan sosial jugalah yang menentukan bagaimana agama itu menjadi instrumen yang menggerakkan masyarakat (Siddiq, 2015; Zamzami, 2015). Sementara masyarakat Bugis, agama menjadi alat untuk menjaga kelangsungan lingkungan. Kesadaran ini diturunkan oleh generasi sebelumnya dengan menekankan kepada sikap etik keagamaan terhadap penjagaan lingkungan (Ramble, 2008). Begitu juga di Nepal, lingkungan dapat terjaga dan dijadikan sebagai sandaran hidup bagi masyarakat karena adanya faktor agama yang senantiasa mendukung kampanye pelestarian lingkungan (Stevens, 1997; West, 2006, Ismail Suardi Wekke, 2016).

Penanaman kesadaran akan dimensi multikultural di tengah masyarakat yang plural dan multikultural melalui pendidikan menjadi urgen sebab pendidikan merupakan pintu masuk potensial untuk menanamkan apresiasi terhadap adanya keragaman baik karena latar belakang suku, agama, jenis kelamin, dan latar belakang ekonomi keluarga dan lain-lain di kalangan mahasiswa (M. Amin Abdullah, 2007). Hal ini yang kemudian telah melahirkan perspektif pluralisme dalam pendidikan.

Budaya merupakan unsur-unsur yang sangat terkait dengan kehidupan manusia karena hakikat manusia sebagai hamba dan sebagai makhluk sosial (Dakir, 2017). Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia terkenal dengan keragaman agama serta kebudayaannya. Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu merupakan agama yang resmi diakui di Indonesia (Gay, 2010; Tibi, 2016).

Budaya cenderung melarang seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (Y. Yunus, 2018a). Pelanggaran atas larangan tersebut mengakibatkan adanya konsekuensi yang berat bagi pelanggar. Implementasi budaya *siri'* dalam diri setiap pengelola pemerintahan maupun masyarakat dapat membantu meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap regulasi pemerintahan sehingga efektivitas sistem pengendalian internal pemerintahan

dapat tercapai (M. L. Marzuki, 1995). Meski sebagian besar masyarakat modern menganggap implementasi budaya tersebut merupakan suatu hal yang ketinggalan zaman, namun bagi masyarakat yang masih melestarikan budaya tersebut menganggapnya sebagai salah satu aturan yang paling efektif dalam mencegah seseorang untuk berbuat penyimpangan.

Wujud kebudayaan orang Bugis dapat dilihat dalam *pangngaderreng* (Nurhayati Rahman, 2006) yang terdiri dari empat unsur (*ade'*, *bicara*, *rapang* dan *wari'*) kemudian *sara'* setelah Islam diterima sebagai agama resmi dan umum dalam masyarakat Bugis (Mattulada, 1983, Pelras, 2005, Patmawati, 2014, Kusumayanti, 2007, Patmawati, 2016). Nilai keagamaan (Islam) merupakan nilai tertinggi yang amat dihormati oleh segenap masyarakat Bugis. Kepemilikan terhadap agama Islam melahirkan sebuah istilah "Bukan Bugis kalau tidak beragama Islam. Maka, fragmen sejarah ini kemudian menjadi karakter penting bagi orang Bugis. (Ismail Suwardi Wekke, Arhanuddin Salim, 2018; Y. Yunus, 2018b, 2018c)

Islam dan budaya bagi masyarakat Sulawesi Selatan merupakan masalah fundamental dan asasi. Fundamental karena setiap umat beragama harus memiliki keimanan, dan asasi karena ia menjadi dasar keberagaman. Bagi kaum beriman, agama dan budaya adalah hulu segala kehidupan (Haryono, 2005), (Kranti, 2014). Sedemikian urgennya masalah keimanan sehingga ia menjadi awal bagi setiap orang yang hendak menganut suatu agama (Nurcholis Madjid, dkk, 2005).

Tradisi fiqih, hubungan antar agama dan budaya, muslim dan non-muslim, belum memperoleh penyelesaian secara adil karena dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu (1) fiqih ditulis dalam masa dimana hubungan antara muslim dengan non-muslim tidak begitu kondusif, (2) fiqih ditulis dalam situasi internal umat Islam yang tidak begitu solid, dan (3) adanya simbol-simbol keagamaan yang secara implisit menganjurkan sikap keras terhadap agama lain (Mun'im A. Sirry (ed.), 2004).

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa masyarakat Luwu/Palopo dibagikan 3 kelompok di antaranya: masyarakat Pesisir, masyarakat kota dan masyarakat pengunungan. Dalam berkomunikasi, mereka berbeda bahasa. Masyarakat pesisir menggunakan bahasa Bugis. Sedangkan masyarakat pengunungan di Kota Palopo dalam berkomunikasi menggunakan bahasa *Tae*, secara budaya lebih cenderung ke bahasa Suku Toraja dan masyarakat perkotaan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia.

Kota Palopo merupakan kota yang berada provinsi Sulawesi Selatan penduduk dan agamanya sangat majemuk. Kota Palopo penduduknya bermacam suku seperti suku Bugis, Toraja, Jawa, Bali, Madura, Sunda dan agama yang bermacam pula seperti Islam, Nasrani, Hindu, Budha. Leonar menambahkan bahwa suku Jawa, Sunda dan Bali merupakan angkatan transmigrasi di tahun 1980-an serta pada masa penjajahan merupakan tenaga rodi Belanda di tahun 1930-an yang hingga kini menjadi penduduk tetap yang ikut membangun dan memajukan daerah Luwu (Jennifer, 2007). Walaupun orang sering mengatakan bahwa Luwu termasuk suku Bugis, tetapi orang-orang Luwu itu sendiri menyatakan mereka bukan suku Bugis, tetapi orang

Luwu (Syukur, 2015). Tentu sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat di Kota Palopo. Beragamnya masyarakat di Kota Palopo, maka dibutuhkan upaya untuk melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan agama. Pembaharuan secara strategis (konsep dan teknis) harus selalu digaungkan secara terus menerus, mengingat peserta didik adalah manusia yang sangat dinamis dan unik. Kemajuan teknologi dan informasi yang tidak bisa terelakkan. Maka dibutuhkan konsepsi pendidikan agama yang menjadikan peserta didik berkarakter terbuka, toleran, inklusif, dan pluralis. Tentu ini tidak mudah, begitu banyak rintangan dan halangan bisa saja menjerat ide tentang pembaharuan pendidikan agama ini.

Menurut Bhikhu Parekh (2018) pendidikan pluralisme adalah pendidikan dalam kebebasan, terbebas dari segala macam prasangka, bebas untuk mengeksplorasi serta belajar dari budaya dan perspektif lain di tengah masyarakat yang multikultural. Sejalan dengan Parekh, Muslimin (2018) berpendapat, bahwa pendidikan pluralisme adalah pendidikan yang mengedepankan perubahan perilaku, sikap, serta kualitas karakter seseorang, dengan model pendekatan pembelajaran yang tidak sekadar mentransfer ilmu atau pengetahuan, melainkan juga harus menyentuh hati, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat mengambil keputusan terbaik buat dirinya dan lingkungan sekitarnya. Gagasan pemikirannya pendidikan pluralisme sebenarnya lahir atau bersumber pada penghormatan hak dasar setiap individu terhadap kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Pendidikan pluralisme agama, selain menjadi prinsip-prinsip universalisme, kebebasan, kesetaraan (Bielefeldt, 2013), rasionalisme, humanisme transnasional, nilai-nilai global (Masud, 2002), peradaban, kasih sayang dan keindahan (Abdul Rozak 2015). Pluralisme agama juga merupakan hak prerogatif Tuhan (Rachman, 2011). bahkan *sunnatullah* (Hakim, 2006). Namun pluralisme agama saat ini masih dipandang sebagai paham yang tidak berasal dari Islam. Sehingga terjadi saling fitnah dan adanya ketidakharmonisan antar umat beragama, seperti; tuduhan liberal, sekuler, dan westernisasi.

Agama dan adat dalam masyarakat Kota Palopo memiliki posisi yang khas. Pergulatan pemikiran Islam Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari aspek adat sebagai bagian penting. Sebagaimana kajian Adlin Sila di masyarakat Jawa bahwa tidak memungkinkan untuk melakukan klaim Islam di Indonesia dengan hanya semata-mata melihat satu suku atau etnis saja (Adlin Sila, 2015). e mentara, pola perjumpaan adat dan Islam menemukan bentuk dalam beberapa gambaran seperti di Minangkabau yang mengalami konflik antara keinginan untuk mempertahankan adat dengan penerimaan Islam sebagai agama dan jalan hidup (Adlin Sila, 2011). Adapun dalam tradisi Aceh adat berjalan paralel dengan praktik beragama (Taufik Abdullah, 1966; Za'im Rais, 1994). Ini menunjukkan adanya proses transformasi agama ke dalam adat dengan respon yang berbeda-beda (Stephen Todd dan Andrew Steele, 2006).

Khaled Abou el-Fadl, berpendapat, bahwa semangat toleran dan pluralis dari para penganut agama akan menentukan corak pemahaman teks suci agama tersebut secara toleran (Khaled Abou el-Fadl, 2002), (Ibrahim Kali>n, "2009), (Saleh Saidi et 2002). Peran para tokoh agama dalam memberikan

pemahaman keagamaan kepada para penganut agama menjadi sangat signifikan, apakah pemahaman yang diberikan itu eksklusif ataukah inklusif. Selanjutnya, berbagai pandangan tentang pentingnya toleransi, terimplementasi dengan baik di Kota Palopo, sehingga ketegangan semakin berkurang, dan peran pemerintah Kota Palopo begitu *intends* dalam menyosialisasikan serta memberi pemahaman tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai dalam keragaman melalui pemanfaatan pranata-pranata sosial, seperti; kebudayaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, terlebih lagi jika dilihat dari sejarahnya, suku Toraja (Kristen) dan Islam di Tana Luwu (Kota Palopo) sangat menjunjung toleransi beragama dan bermasyarakat.

Model pendidikan karakter di perguruan tinggi menjadi bagian penting untuk mengembangkan pendidikan karakter mahasiswa (Dasim 2010; Dakir, 2019). Dalam hal ini setidaknya ada tiga model atau pendekatan yang dapat dilakukan yaitu: Pertama, pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas perkuliahan Islam dan kearifan lokal, Pendidikan Agama, kearifan lokal keluwuan bahkan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan diarahkan bagaimana mahasiswa menjadi aktif dan dapat meningkat melalui tahapan pembelajaran dengan mendorong dan membangkitkan nilai-nilai karakter yang tentunya diharapkan akan muncul dari mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan jika pada tahapan perkuliahan Pendidikan Agama Islam, ISD/IBD, pendidikan multikultural arahnya kepada pengembangan potensi mahasiswa. Kedua, pendidikan karakter melalui layanan bimbingan dan konseling baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan, serta diarahkan bagaimana seorang mahasiswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan selanjutnya masalah orang lain dengan tumbuhnya kesadaran akan segala potensi yang dimilikinya, semua itu dilakukan dengan tujuan agar mampu mengembangkan kepercayaan diri mahasiswa untuk maju dan berkembang. Ketiga, pendidikan karakter melalui kuliah kerja nyata.

Model pembelajaran pluralisme yang hanya menekankan kebenaran agamanya sendiri dan ketidak-benaran agama lain. Seharusnya direkonstruksi ulang. Konsepsi pemahaman yang biner seperti iman kafir, muslim non muslim, dan baik benar. Yang sangat berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat terhadap agama lain misalnya mau tidak mau harus 'dibongkar ulang'. Agar sekelompok penganut agama tidak lagi memandang agama lain. Sebagai agama yang 'salah' dan tidak ada jalan keselamatan kecuali dalam agama yang diyakininya (Isnain, 2018).

Kegagalan dalam menumbuhkan kembangkan sikap toleran dan inklusif dalam pendidikan agama. Hanya akan melahirkan sayap radikal dalam beragama. Meminjam filsafat pendidikan Paulo Freire (2007). Sudah saatnya pendidikan agama diarahkan pada arena pembebasan dari belenggu doktrin-doktrin agama yang eksklusif dan intoleran. Menuju formulasi pendidikan agama yang inklusif. Karena sejak awal pendidikan harus diarahkan untuk proses kemerdekaan, bukan menjinakkan budaya yang serba eksklusif. Sebab cara pandang atau pemahaman teologis yang eksklusif dan intoleran yang demikian. Pada gilirannya akan dapat merusak harmonisasi agama-agama dan

menghilangkan sikap untuk saling menghargai kebenaran dari agama lain.

Menurut Azyumardi Azra (2007), untuk membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama dan menciptakan suasana inklusif dalam beragama. Maka dibutuhkan kemampuan dari setiap kelompok keagamaan. Untuk mendalami pemahaman *mutual* atas doktrin-doktrin dan praktik-praktik kelompok keagamaan lain sebagai prioritas pertama. Hal ini dilakukan sebagai pendalaman terhadap pengenalan kemajemukan terhadap aspek tafsir ajaran keagamaan. Posisi pemahaman mutual ini bagi penulis memungkinkan terciptanya pemahaman keagamaan yang inklusif. Pendidikan pluralisme sejatinya harus membangun visi pendidikan yang mengembangkan aspek tersebut di atas.

Kurikulum pendidikan yang toleran-pluralis perlu diterapkan sejak dini. Supaya peserta didik terbiasa dengan keragaman dan perbedaan. Dan mampu menyikapi kemajemukan dan perbedaan itu dengan sikap “dewasa”, *peacefully* (damai), nir-kekerasan, *wise* (bijaksana), dan *civilized* (beradab). Keterbukaan menjadi kata kunci sekaligus pra-syarat *religious encounter* yang sehat dan dinamis serta jalan terciptanya perdamaian global antar umat beragama (Al Qurtuby, 2011).

Para pendidik diharapkan dapat memaparkan bahwa agama bisa ditransformasikan sebagai kekuatan penggerak perdamaian, persatuan, toleransi, dan pluralisme. Bukan sebagai motor penggerak kekerasan, perpecahan, dan anti-pluralisme seperti dilakukan kelompok militan-radikal agama. Di samping mengarahkan pada pendidikan humanis, pendidikan pluralisme juga mengarahkan pada pendidikan “damai”.

Menyikapi hal ini, praktik pendidikan di perguruan tinggi selanjutnya menjadi agen sosialisasi budaya Kota Palopo dalam upaya menyosialisasikan kebudayaan melalui pendidikan, Azyumardi Azra (2003) berpendapat, perguruan tinggi memang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya bibit-bibit demokrasi. Dia menambahkan, bahwa pemeliharaan tradisi tidak diwariskan begitu saja, karena pola berpikir, tindakan, dan juga budaya demokrasi adalah sesuatu yang harus disosialisasikan, diajarkan, serta diaktualisasikan kepada generasi muda melalui jalur pendidikan.

Dengan demikian, sudah menjadi suatu yang umum-untuk tidak mengatakan wajib dan lumrah-perguruan tinggi ikut membentuk pola pikir, perilaku, dan budaya pada anak didik untuk selalu menghargai keberagaman. Lingkungan perguruan tinggi sedapat mungkin harus dijadikan tempat yang memungkinkan mahasiswa dapat membiasakan diri berada dalam kebersamaan tanpa mengorbankan kebhinekaan sebagai sesuatu yang bersifat asasi dalam diri manusia.

Dalam budaya Bugis untuk menjaga keharmonisan dalam sebuah hubungan, biasanya masyarakat menggunakan model *tudang sipulung*. *Tudang Sipulung* merupakan budaya musyawarah di Bugis Sulawesi Selatan untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat dan pelaksanaan tidak ada paksaan dalam mengemukakan pendapat, etos kerja (*resopa natemmangingi Malomo naletei pammase dewata*), dan penegakan hukum (*getteng, lempu, ada tongeng*). (Ismail Suwardi Wekke, Arhanuddin Salim, 2018; S. Yunus, 2020).

Dengan sikap inklusif inilah yang harus menjadi acuan dalam pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal (Baharun & Zulfaizah, 2018). Sebab dengan pendidikan tentu diharapkan akan lahir generasi penerus bangsa yang menghargai kemajemukan. Upaya ke arah pembentukan karakter mahasiswa yang inklusif dan toleran harus senantiasa digalakkan.

Tujuan penelitian ini, ingin menggambarkan model *tudangsipulung* (duduk bersama) dapat mendorong ke arah kesatuan untuk menempatkan agama sebagai suatu yang suci. Sementara kearifan lokal menjadi sarana untuk menjembatani kepercayaan yang ada. Ini terjadi dalam praktik pendidikan yang mengedepankan pertautan antara agama dan tradisi, sehingga menghasilkan produktivitas dalam bentuk sosial. Dengan penanaman moral keagamaan yang baik, maka pasti akan diikuti dengan terbangunnya tradisi yang baik.

Penerapan pendidikan kearifan lokal model *tudangsipulung* pada sudah banyak meneliti dengan model yang sama. Namun, ketika diterapkan pada perguruan tinggi penulis belum menemukan. Sehingga penelitian ini, bisa dikatakan penelitian baru yang menggunakan *tudangsipulung* di perguruan. Selain itu, budaya Bugis sudah menjadi budaya lokal yang masih dipegang teguh masyarakat sulawesi selatan khusus perguruan tinggi di Kota Palopo, ini yang menjadi objek penelitian merupakan sebuah penelitian terbaru yang perlu dikaji lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan etnopedagogi. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, informan yang diwawancarai berasal dari beberapa kalangan, dari akademis (Dosen) sebanyak 6 orang, kalangan mahasiswa bersumber dari beberapa suku, Toraja sebanyak 4, Rongkong 4 orang, Bugis 9 orang dan mahasiswa 8 orang. Peneliti juga, mewawancarai kalangan tokoh masyarakat sebanyak 6 orang. Adapun analisis data, penulis memilih data yang relevan dilanjutkan dengan mencari makna. Pemberian makna yang merupakan upaya yang lebih jauh dari penafsiran. Data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif deskriptif adalah menggambarkan dan memaparkan data hasil penelitian, baik yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan berupa kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Analisis kualitatif, umumnya tidak digunakan sebagai alat mencari data dalam arti frekuensi. Akan tetapi, digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak dipermukaan itu. Dengan demikian, maka analisis kualitatif digunakan untuk memahami sebuah proses dan fakta dan bukan sekedar untuk menjelaskan fakta tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan budaya yang tercermin dari modal utama dalam membangun relasi sosiologis di tengah umat yang berbeda agama dan budaya. Paling tidak inilah yang bisa dipahami dari komentar Ikram di atas. Kesadaran personal yang diterangi oleh sinar iman kebenaran, tentu akan melahirkan kesadaran

sosiologis yang berimplikasi pada terciptanya hubungan yang harmonis di antara pemeluk agama yang berbeda keyakinan. Pada kondisi ini akan tercipta *strengthening at the micro-level of society* (Sheila C. Gordon dan Benjamin Arenstein, 2017).

Pendidikan budaya harus diselenggarakan dengan prinsip *the openness to reflect critically on one's own position*. (Oddbjørn Leirvik, 2014, Nazia Islam, 2014). Prinsip yang mengedepankan keterbukaan secara kritis bagi setiap mahasiswa dalam memandang diri sendiri dan orang lain. Daya kritis tidak hanya dibutuhkan ketika diperhadapkan pada tradisi agama lain. Tetapi, berani dan jujur secara terbuka untuk melakukan *selfcritical* terhadap keyakinan diri sendiri adalah bagian penting dari pelaksanaan pendidikan lintas iman. Keberanian mengungkapkan kelemahan dan kesalahan beberapa oknum se-agama yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi dan golongan adalah bagian dari keterbukaan tanpa syarat. Ini bisa terjadi, jika seluruh ego dan emosi subjektivitas dalam beragama dapat ditekan dan diredam dengan penuh ketulusan dan rasa cinta. Semua melebur dalam keragaman yang saling melengkapi.

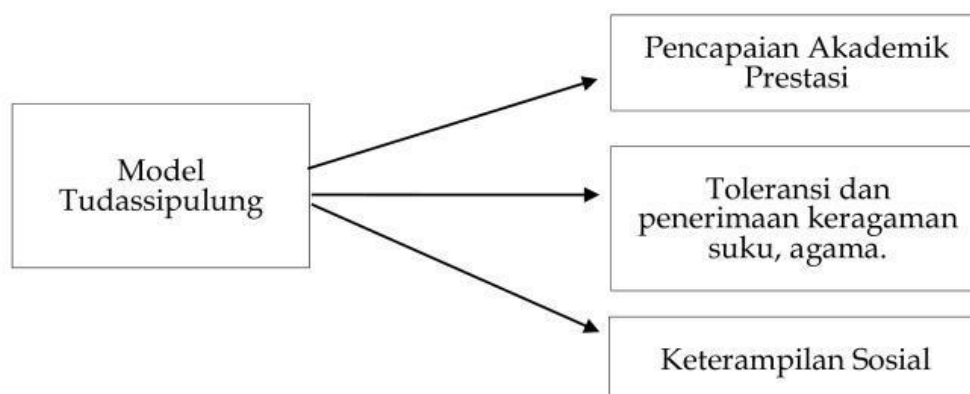
Perubahan pemahaman mahasiswa dari yang tadinya penuh prasangka, lalu berubah menjadi penghargaan dan apresiasi positif terhadap tradisi budaya lain. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal tidak memberi ruang bagi peserta didiknya untuk bisa melakukan konversi agama/budaya. Di sinilah pentingnya penguatan "budaya". Dalam hal ini Ikram menjelaskan, bahwa sebagian besar merasa beruntung mengikuti kuliah di IAIN Palopo, dan mereka mempunyai persepsi positif terhadap budaya Toraja dan Rongkong, Jawa bahkan Sasak (Abdul Hafid, 2016). Di samping itu relasi budaya dalam dimensi visi misi IAIN Palopo adalah penguatan pada aspek personal, dengan meyakini bahwa budaya kita sama, bahwa dalam konteks ajaran sebagai sebuah "kotak makanan" tentu kita berbeda, tetapi pada aspek prinsipil dalam bentuk isi kotak tersebut adalah kita sama. Proses penghayatan iman dapat mencairkan kebakuan keberagaman kita selama ini, tentu dalam hal ini kita harus banyak menghayati budaya dalam domain atau aspek spiritualitas (Ikram 2019).



Gambar 1 : Penerapan kearifan lokal budaya Bugis di IAIN Palopo

Metode pembelajaran *tudasipulung* seperti hal metode pembelajaran kooperatif mengembangkan 3 (tiga) aspek secara integral yaitu kognitif (intelektual), afektif (penghargaan), dan psikomotorik (keterampilan sosial).

Pengembangan Aspek Akademik dalam mata kuliah pendidikan karakter dan pendidikan Islam dan kearifan lokal:



Gambar 2 : Pengembangan aspek akademik

Dengan model pembelajaran *tudassipulung*, secara teori, model digunakan oleh masyarakat Bugis dahulu. Namun mahasiswa yang kuliah di IAIN Palopo dan mereka beragam ada suku Toraja, Jawa, Luwu, Rongkong dan Seko yang notabene bahasa yang digunakan sehari-hari bukan bahasa Bugis. Sehingga butuh waktu dan pendamping untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tersebut, khususnya pada aspek pemahaman substansi model pelajaran. Sehingga dibuatkan beberapa kelompok, untuk memberikan pengetahuan, sikap kebersamaan dan saling tolong menolong relevan dengan semangat plural.

Sehingga pelaksanaan model *tudassipulung* cukup efektif, ini terlihat dalam penerapan di dalam kelas maupun di luar kelas. 1) Pesse/empati dengan indikatornya merasakan penderitaan orang lain sebagaimana penderitaan diri sendiri; 2) Kasih sayang dengan indikatornya sayang terhadap lingkungan; 3) kebersamaan dengan indikatornya menunjukkan sikap senang bekerja sama dengan orang lain; 4) menghargai perbedaan, dengan indikatornya menghindari sikap merendahkan orang lain; 5) Rela berkorban dengan indikatornya memberikan perhatian pada kepentingan umum; 6) tenggang rasa dengan indikatornya memberikan kesempatan kepada teman untuk melakukan sesuatu yang lebih baik; 7) Toleransi dengan indikatornya sikap sabar membiarkan orang lain berbuat sesuai dengan keyakinannya sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku; dan 8) tolong menolong dengan indikatornya berusaha untuk membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi orang lain, menunjukkan kriteria baik yang ditunjukkan oleh perilaku mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung melalui observasi pembelajaran yang merupakan bagian dari penilaian.

Toleransi beragama kedengarannya menjadi hal yang biasa saja. Tetapi, praktik pelaksanaannya kadangkala menghadapi berbagai macam kendala. Peran seorang muslim dalam bertoleransi dengan pemeluk agama lain seperti orang mahasiswa Seko dan saudara kita dari Tator (*Tau* Toraja). Islam, sebagaimana pemahaman tersebut, adalah Islam yang ramah. Islam yang memberi ruang bagi perkembangan agama lain untuk bisa tumbuh dan berkembang. Toleransi yang dipraktikkan ini sudah berwujud menjadi sikap inklusif dalam beragama. Hal inilah yang disebut sebagai *acknowledging differences* (Baidhawry, 2007). Pengakuan terhadap perbedaan. Tanpa harus terjebak pada penilaian benar atau salah terhadap keyakinan orang lain.

Selain berfungsi sebagai agen sosialisasi budaya, perguruan tinggi juga berfungsi sebagai sarana penanaman solidaritas sosial yang mengarah pada sikap saling percaya antar sesama warga dan bersama-sama mewujudkan demokrasi di Kota Palopo. Menurut Putnam (1993) sikap saling percaya merupakan unsur modal sosial yang sangat penting. Demokrasi yang terbangun dalam masyarakat, interaksi sosialnya sangat kompleks. Kerjasama dan koordinasi dalam masyarakat hampir tidak mungkin terwujud, jika hal itu hanya didasarkan pada pengetahuan dan kalkulasi rasional anggota masyarakatnya secara individual, karena individu memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan untuk membuat keputusan (Saipul 2007).

Sikap saling percaya (*trust*) membantu orang untuk memecahkan setiap masalah, dan karena kerjasama kolektif tersebut, memungkinkan komunitas untuk berinteraksi, sekalipun diantara mereka terkadang tidak memiliki kecukupan pengetahuan (Warren, 1999). Proses pendidikan di perguruan tinggi bertujuan untuk mentransmisikan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari budaya, berupa penghargaan hak-hak individu serta menumbuhkan semangat kerja.

Meski ada beberapa model atau varian, tetapi semuanya tak keluar dari bingkai tiga kategori populer, yaitu eksklusif, inklusif, dan pluralis. Dalam konteks hubungan di antara masyarakat dunia yang plural dan global saat ini, sejumlah intelektual menilai bahwa cara pandang eksklusif tak memadai untuk diterapkan. Pandangan eksklusif cenderung bersikap negatif dan merendahkan agama orang lain. Kaum eksklusif akan menolak prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan serta bentuk-bentuk manifestasinya. Karena itu, kelompok eksklusifis, terutama yang ekstrem, memiliki potensi untuk menjadi malapetaka bagi kerukunan (harmoni) antar umat beragama, karena bagi mereka, perbedaan dianggap sebagai ancaman yang harus dimusnahkan ketimbang rahmat yang mesti disyukuri.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Kota Palopo, kesadaran akan pentingnya pemahaman pendidikan pluralisme agama yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan informal dengan tujuan membentuk individu-individu yang toleran dalam keluarga dan lingkungannya yang multi-etnis dan agama, dilaksanakan melalui model pendidikan *etnopedagogi* (pendidikan berbasis kearifan lokal).

Pendidikan berbasis *etnopedagogi* adalah sebuah praktik pendidikan berbasis kearifan lokal, yaitu; bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dan diwariskan melalui sarana kearifan lokal pada suatu daerah. Lebih jauh, kearifan lokal (*lokal wisdom*) berarti; pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas, dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Di samping itu, kearifan lokal juga dapat dimaknai sebagai sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang hidup di dalam masyarakat lokal (Suwardi, 2010).

Bagi masyarakat di Kota Palopo sudah menjadi sebuah keharusan untuk merawat dan menjaga alam dengan bersih, rapi, indah, dan sehat, seperti; tidak menebang pohon sembarangan (*illegal logging*), pencemaran udara, pencemaran air, menata taman-taman agar terlihat menarik, dan lain-lain. Fenomena seperti ini menjadi sesuatu yang biasa terjadi (lumrah) pada masyarakat Tana Luwu pada umumnya.

Islam adalah agama yang bukan saja merupakan pedoman bagi manusia dalam hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan atau supranatural (*hablum min Allah*), tetapi juga merupakan pedoman dalam mengatur hubungan dengan sesama manusia (*hablum min annas*) sekaligus juga memberikan pedoman dalam bersikap terhadap lingkungan alam (*hablum min al-'alam*) Nottingham, 1985), (Poloma, 1979). Jika dilihat dalam al-Qur'an- sebagai pedoman beragama

bagi Muslim-sudah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia, bahwa ada dua sasaran penting yang hendak dicapai melalui pembangunan bidang agama, yaitu peran agama dalam proses pembangunan nasional dan peran agama sebagai pembinaan kerukunan hidup beragama. Dua sasaran ini saling berkait bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan

Makna dalam menjalin hubungan baik dengan tuhan (*hablum min Allah*), menjalin hubungan baik dengan manusia (*hablum min annas*), dan menjalin hubungan baik dengan alam (*hablum min al-'alam*), yang dalam terminologi Tana Luwu dikenal dengan istilah *padaidi* di dalamnya ada unsur 4 S (*Sipakatau, Sipakalebbe, Sipakaingge, Sipakatou*), meniscayakan, bahwa manusia selalu merindukan puncak keagungan dalam segala dimensi eksistensialnya. Menciptakan harmonisasi diantara tiga unsur ini merupakan "jalan ideal" spiritualitas yang memantapkan jiwa dan mengarahkan hidup agar tidak ambigu, fana, apalagi paradoks.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan budaya Bugis dengan model *tudassipulung* cukup efektif, ini terlihat dalam penerapan di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada penilaian yang dikembangkan meliputi 5 (lima) karakteristik penting yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral dengan 5 tingkatan, yaitu: a) *receiving*, pada tingkat *receiving* atau *attending*, diketahui dengan adanya beberapa indikator yaitu kesadaran, keinginan menerima, perhatian yang terkontrol dan terseleksi pada diri peserta didik; b) *responding*, pada tingkat *responding* ini diketahui dengan adanya beberapa indikator yaitu adanya pemerolehan respon, keinginan untuk merespon, dan kepuasan dalam memberi respon dalam diri peserta; c) *valuing*, tahap ini terkait dengan penentuan nilai dan sikap yang menunjukkan komitmen mahasiswa; d) *organization*, pada tingkatan mahasiswa mulai membuat konseptualisasi nilai dan organisasi sistem nilai yang konsisten; dan e) *characterization*, tahap ini merupakan tahap tertinggi dalam penilaian afektif, dimana mahasiswa memiliki dua poin penting, yaitu sistem nilai yang mengendalikan perilaku dan kepercayaan, ide, dan perilaku yang terintegrasi dalam totalitas pandangan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sirry, Mun'im (ed.). (2004). *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina.
- Abdullah, M. Amin. (2007). Kesadaran Multikultural: Sebuah Gerakan, Interest Minimalization` dalam Meredakan Konflik, dalam Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Abdullah, Taufik. (1966). "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia*, No. 2, 1.
- Adlin Sila, M. (2015). *MAudu' A Way of Union with God*.

- Aghsari, Diah dan Ismail Suardi Wekke. 2015. Ritual Sasi Laut; Akulturasi Agama dan Budaya dalam Praktik Ritual Kebaharian Masyarakat Misool Raja Ampat, *Jurnal Kalam*, Vol. (1), Juni, 11.
- Al Qurtuby, Sumanto. (2011). "Pluralisme, Dialog, dan *Peace building* Berbasis Agama di Indonesia", dalam *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Democracy Project-Yayasan Abad Demokrasi, 193.
- Azra, Azyumardi. (2003). "Pendidikan Multikultural, Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika", *Republika*, Rabu 3 September.
- Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2017). Pendidikan Multikultural dalam Menanggulangi Narasi Islamisme di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 5(2), 224-243.
- Baharun, H., & Zulfaizah. (2018). Revitalisasi Pendidikan Agama dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Madrasah. *ELEMENTARY*, 6(1), 43-62.
- Baidhaw, Zakiyuddin. (2007). "Building Harmony and Peace through Multiculturalist Theology-Based Religious Education: An Alternative for Contemporary Indonesia" *British Journal of Religious Education*, 29:1, 21.
- Bielefeldt, Heiner. (2013). "Misperceptions Freedom of Religion or Belief" *Journal of Human Right Quarterly*, 35, No. 1, 33-68.
- Budimansyah. Dasim dkk. (2010). *Model Pendidikan Karakter di Peguruan Tinggi: Penguatan PKn, Layanan Bimbingan Konseling, dan KKN tematik di Universitas Pendidikan Indonesia*. Bandung: UPI, 11.
- Carmody, Brendan. (2010). "Interreligious Education and the Question of Truth" in Kath Engebretson, etl., *International Handbooks of Religion and Education*, (Springer Science+Business Media B.V, 50.
- Dakir. (2019). *Manajemen Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya di Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: K-Media.
- Dakir, D. (2017). Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat Pada Huma Betang dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 28-54. <https://doi.org/10.15642/religio.v7i1.707>
- Damsar. (2012). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 6.
- Dubbun Hakim, Abdul. (2006). "Islam, Inklusivisme, dan Kosmopolitanisme" dalam *menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholis Madjid*, eds., Abdul Halim. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 14.
- Endraswara, Suwardi. (2010). *Kearifan Lokal di Yogyakarta*. Yogyakarta: Penelitian Pemda DIY.
- Fitri Kusumayanti. (2007). "Penggunaan Bahasa Ugi Sebagai Media Komunikasi dalam Interaksi Sosial pada Kelompok Etnis Bugis di Desa Punggur Kecil Sungai Kakap Kabupaten Pontianak", *Tesis*. Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak, 85.
- Freire, Paulo. 2007. *Politik Pendidikan: Pendidikan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 83.

- Gay, G. (2010). Acting on beliefs in teacher education for cultural diversity. *Journal of Teacher Education*, 61(1-2), 143-152. <https://doi.org/10.1177/0022487109347320>
- Gordon, Sheila C. dan Benjamin Arenstein. (2017). "Interfaith Education: A New Model for Today's Interfaith Families", (Springer Science+Business: Media Dordrecht and UNESCO Institute for Lifelong Learning, 192.
- Gustina, Nelvia. (2002). "Proses Sosial Antar Kelompok Etnis di Pemukiman Transmigrasi Spontan (Kasus pada Pakon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung) dalam Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Hafd, Abdul. (2016). Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, *Jurnal "Al-Qalam*, Volume 22 Nomor 1 Juni, 257-268.
- Haryono, M. Yudhie. (2005). *Melawan dengan Teks*. Jogjakarta: Resist Book, 1.
- Islam, Nazia. Tiffany Steinwert, and Diane Swords. (2014). "Dialogue in Action: Toward a Critical Pedagogy for Interfaith Education." *The Journal of Interreligious Studies* Newton 13, 4-10.
- Ismail Suwardi Wekke, Arhanuddin Salim, Y. S. (2018). Pendidikan Karakter Dalam Masyarakat Bugis. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11(1), 41-62. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v11i1.3415>
- Isnain, Muhammad. (2018). "Inkonsistensi Pendidikan Agama Islam (Masalah, Solusi dan Re-Orientasi)"
- K. Kay. William dan Leslie J. Francis. (1997). *Religion in Education*. Herefordshire: Fowler Wright Books, 258.
- Kalin, Ibrahim. (2009). "Masa>dir al-Tasa>muh}, wa'adam al-Tasa>muh fi al-Islam", *Majalah Adyan*, 26-32.
- Khalid Masud, Muhammad. (2002). "the Scope of Pluralism in Islamic Moral Traditions" in *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict*, eds., Sohail H. Hashmi (The United of America Princeton University Press, 136.
- Leirvik, Oddbjørn. (2014). "Interreligious Studies: A Relational Approach to the Study of Religion." *The Journal of Interreligious Studies*, Issue 13, Winter 2014, 16.
- Lindsay, Jennifer. (2007). Intercultural Expectations: I La Galigo in Singapore, *TDR (1988-)* Vol. 51, (2) Summer, 60-75.
- MacNeill, N. et al. (2011). Beyond Instructional Leadership: Towards Pedagogic Leadership. Auckland: Australian Association for Research in Education.
- Madjid, Nurcholis dkk. (2005). *Fikhi Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Plularalis*. Paramadina: Jakarta.
- Malik Thoha, Anis. (2005). *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif, 263-265.
- Mariam, Sharan B. (1998). *Qualitative Research and Case Study Application in Education*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 5.
- Marzuki, M. L., (1995). *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*. Makassar: Hasanuddin University Press, 17.

- Mattulada. (1983). *"Islam di Sulawesi Selatan"* dalam *Agama dan Perubahan Sosial* ed. Taufik Abdullah. Jakarta: Rajawali pp. 235.
- Mujani, Saipul. (2007). *Muslim Demokrat: Islam dan Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 118.
- Munawar-Rachman, Budhy. (2001). *Islam Pluralis*, Jakarta: Paramadina,
- Nottingham, Elizabeth K. (1979). mengatakan "sejarah mencatat Margaret M. Poloma, *Contemporary Sociological Theory* (New York: Macmillan Publishing Co. Inc, 15-30 dan 65-90.
- Parekh, Bikhu. (2018). "Rethinking Multiculturalism" *Cultural Diversity and Political Theory*. <http://www.educationworld.com>. diakses tanggal 21 Februari.
- Patmawati. 2014. "Bugis Kalimantan Barat Abad XX-XXI, *Disertasi*. UIN, Makassar.
- Patmawati. (2016). Peranan Nilai Filosofi Bugis Terhadap Proses Pengislaman Kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*, Volume 6 (2) September. pp. 184.
- Pelras, Christian. (2005). *"Budaya Bugis: Sebuah Tradisi Modernitas"* dalam *Tapak-tapak Waktu Kebudayaan, Sejarah, dan Kebudayaan Sosial di Sulawesi Selatan*, peny. Kathryn Robinson dan Mukhlis Paeni, Makassar: Innawa.
- Putnam, Robert. (1993). *Making Democracy work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princenton: NJ: Princenton University Press, 170.
- R. Shah, Sheetal. (2006). *The Impact of Acculturation and Religion on Intergenerational Family Conflict for Second Generation Asian Indian Americans*, Tesis. Carbondale: Southern Illinois University.
- Raharjo Jati, Wasisto. (2013). "Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan", *Jurnal Walisongo*, 21, (2), 393-416.
- Rahman, Nurhayati. (2006). *Cinta, Laut dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo* Makassar: La Galigo Press. 387.
- Ramble, C. (2008). *The Navel of the Demoness: Tibetan Buddhism and Civil Religion in Highlight Nepal*. Oxford: Oxford University Press.
- Rozak, Abdul. (2015). "Political Thoughts and Socio-Cultural Nationalism Ideologies of Nurcholis Madjid on Strengthening Democracy, Civil Societies and Civic Virtues in Indonesia", *Asian Social Science International Journal*, 11, No. 27, 142-145.
- Rais, Za'im. (1994). "The Minangkabau Traditionalists' Response to The Modernist Movement", *disertasi*, Montreal: McGill University.
- Saidi, Saleh et al., eds., (2002). *Sejarah Keberadaan Umat Islam di Bali*. Denpasar: MUI.
- Sila, Adlin. 2011. "Memahami Spektrum Islam di Jawa", *Indonesian Journal for Islamic Studies Studia Islamika*, Vol. 18, (3), 611.
- Stevens, S. (1997). "Annapurna Conservation Area: Empowerment, Conservation and Development in Nepal" dalam Stevens, S. (ed.), *Conservation Through Cultural Survival*, Washington: Island Press, 237-261.
- Syukur, S. (2015). Sistem Pemerintahan Kedaduan Luwu Dalam Kurun Periode I Lagaligo (Abad IX-XIII). *Jurnal Rihlah*, 3(1), 24-34. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.0625>